

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan

Yomima lamera^{a,1*}, Apeles Lexi Lonto^{b,2}, Julien Biringan^{c,3}

^{a,b,c}Universitan Negeri Manado, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara

Email: yominalamerayomina@gmail.com

*Corresponding Author: Yomima Lamera

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Oktober 2025

Direvisi: 25 November 2025

Disetujui: 15 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Kata Kunci:

Peran Pemerintah

Pengelolaan Kebersihan

Partisipasi Masyarakat

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta mengkaji upaya yang dilakukan guna mendorong partisipasi masyarakat di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, dan penelusuran dokumen pendukung. Subjek penelitian terdiri atas perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Koya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Koya telah menunjukkan peran yang cukup aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kerja bakti secara berkala, penyediaan kontainer sampah sementara, layanan pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui rapat RT/RW, pemasangan spanduk, pemanfaatan media sosial, dan dukungan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan kebersihan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan fasilitas seperti tempat pembuangan sementara, kendaraan pengangkut sampah, dan peralatan kebersihan. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta minimnya tenaga kebersihan turut memengaruhi efektivitas program yang dijalankan.

ABSTRACT

Keywords:

Role of Government

Cleanliness Management

Community Participation

This study was conducted to analyze government involvement in environmental cleanliness management, identify emerging obstacles, and examine efforts made to encourage community participation in Koya Village, South Tondano District. The method used was a qualitative approach, with data collection through in-depth interviews, direct field observations, and review of supporting documents. The research subjects consisted of village officials, community leaders, and residents of Koya Village. The research findings indicate that the Koya Village Government has demonstrated a fairly active role in maintaining environmental cleanliness. This is realized through the implementation of regular community service, the provision of temporary waste containers, waste collection services using cleaning vehicles, and socialization activities conducted through neighborhood association (RT/RW) meetings, banner installation, the use of social media, and support from religious and community leaders. However, the implementation of cleanliness management still faces several obstacles, particularly limited facilities such as temporary disposal sites, waste collection vehicles, and cleaning equipment. In addition, low awareness among some residents and a shortage of cleaning personnel also affect the effectiveness of the program.



1. Pendahuluan

Kebersihan lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Lingkungan yang terpelihara dengan baik tidak hanya berdampak pada kesehatan jasmani, tetapi juga berpengaruh terhadap kenyamanan, estetika, serta tingkat produktivitas warga. Soemarwoto (2001:45) mengemukakan bahwa upaya menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian integral dari konsep pembangunan berkelanjutan karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat dan pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan kebersihan lingkungan perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, posisi pemerintah memiliki peran yang sangat strategis. Suryono (2010:112) menyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pihak utama dalam penyediaan berbagai bentuk pelayanan publik, termasuk dalam bidang kebersihan lingkungan. Peran pemerintah tidak hanya sebatas menetapkan regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Pendapat ini sejalan dengan Kartasasmita (1997:87) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai.

Meskipun demikian, permasalahan kebersihan lingkungan masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia. Slamet (2014:53) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, serta sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan secara optimal merupakan faktor utama yang menyebabkan permasalahan kebersihan sulit diselesaikan Creswell (2014:190). Oleh sebab itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih maksimal, baik dalam perencanaan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan pelaksanaan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kondisi serupa juga terjadi di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat, terdapat beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, antara lain:

- a. Penumpukan sampah pada lokasi tertentu: Sampah masih sering ditemukan menumpuk di kawasan permukiman dan sepanjang jalan akibat jadwal pengangkutan yang belum berjalan secara rutin.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan: Jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) masih minim dan penyebarannya belum merata, sehingga menyulitkan warga dalam membuang sampah sesuai ketentuan.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat: Sebagian masyarakat belum terbiasa membuang sampah pada tempat yang disediakan dan kurang aktif dalam mengikuti kegiatan kerja bakti.
- d. Koordinasi pemerintah dan masyarakat yang belum optimal: Program kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan masih bersifat insidental dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.
- e. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat: Penumpukan sampah kerap menimbulkan bau tidak sedap serta berpotensi menjadi sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan warga sekitar.

Dwiyanto (2006:64) menyatakan bahwa kualitas kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui kemampuan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pelayanan kebersihan lingkungan. Apabila berbagai permasalahan tersebut tidak

ditangani secara serius, maka akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup serta citra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai peran pemerintah kelurahan dalam menangani permasalahan kebersihan lingkungan, tingkat partisipasi masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya Miles, Huberman, dan Saldana (2014:33). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan kebersihan lingkungan yang lebih efektif di masa yang akan datang Patton (dalam Moleong, 2017:330).

2. Metode

Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh, dengan menyajikan deskripsi berupa kata-kata atau narasi dalam konteks yang alami. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam peran pemerintah dalam mengelola kebersihan lingkungan di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kelurahan Koya telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kerja bakti secara berkala, penyediaan kontainer sebagai tempat penampungan sementara, serta pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan yang tersedia. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya lingkungan sehat juga diberikan melalui kegiatan posyandu, pertemuan warga, serta dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Program penghijauan dan perbaikan saluran drainase turut menjadi bagian dari strategi pencegahan agar tidak terjadi penumpukan sampah di aliran air

Meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama karena keterbatasan sarana dan prasarana seperti jumlah TPS, kendaraan pengangkut sampah, serta perlengkapan kerja bakti yang belum memadai. Akibatnya, pelayanan kebersihan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Dari segi sosialisasi, pemerintah kelurahan tergolong aktif dalam menyampaikan informasi melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk, media sosial, dan imbauan langsung kepada warga. Namun, penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena belum semua masyarakat memperoleh informasi secara merata.

Dalam aspek pengawasan, aparat kelurahan bersama petugas kebersihan melakukan pemantauan lapangan serta menindaklanjuti laporan dari RT/RW. Namun, kegiatan pengawasan tersebut belum dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan jumlah personel. Kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat, yang cenderung meningkat ketika pengawasan dilakukan secara intensif, tetapi menurun ketika kehadiran aparat di lapangan berkurang.

B. Kendala Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan kebersihan di Kelurahan Koya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pendukung, terbatasnya anggaran, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersedia sering kali cepat penuh, kendaraan pengangkut sampah tidak selalu beroperasi secara optimal, dan perlengkapan kebersihan

yang ada jumlahnya masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan sampah tidak segera terangkut sehingga menumpuk dan mengurangi kenyamanan lingkungan. Di samping itu, jumlah petugas kebersihan dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah perilaku sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya peduli terhadap kebersihan. Meskipun terdapat warga yang aktif mengikuti kerja bakti dan menjaga lingkungan, masih ada pula yang kurang disiplin, bahkan membuang sampah sembarangan, termasuk pada malam hari.

Koordinasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sebenarnya telah terjalin melalui RT/RW. Namun, pelaksanaannya belum berlangsung secara konsisten. Tingkat partisipasi warga cenderung berfluktuasi, bergantung pada intensitas imbauan serta kehadiran aparat di lapangan. Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kebersihan, minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penambahan fasilitas, penguatan sumber daya manusia, edukasi yang berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan masyarakat agar pengelolaan kebersihan dapat berjalan lebih efektif.

C. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam upaya mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah kelurahan telah menempuh berbagai strategi. Langkah tersebut meliputi pengaktifan kembali kegiatan kerja bakti secara berkala, penyampaian imbauan secara langsung kepada warga, pelibatan pihak sekolah serta organisasi kepemudaan, dan kerja sama dengan tokoh agama maupun tokoh adat untuk memperkuat pesan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan kerja bakti umumnya dilaksanakan satu kali setiap bulan, terutama menjelang perayaan tertentu atau ketika muncul permasalahan mendesak, seperti banjir yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Selain itu, pemerintah memberikan bentuk apresiasi sederhana, misalnya penghargaan bagi RT/RW dengan lingkungan paling bersih atau bantuan perlengkapan kebersihan kepada kelompok warga yang aktif. Namun demikian, belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebersihan membuat sebagian masyarakat masih kurang disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan tanggapan masyarakat, sebagian besar warga mengaku pernah menerima ajakan untuk mengikuti kerja bakti dan memandang kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Akan tetapi, tingkat partisipasi warga cenderung tidak stabil. Kehadiran biasanya meningkat saat ada perayaan atau kegiatan besar, namun menurun pada hari-hari biasa. Secara keseluruhan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mulai dari kerja bakti rutin, sosialisasi, pemberian penghargaan, hingga pelibatan berbagai unsur masyarakat. Meskipun demikian, keberhasilan program tersebut masih sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kesadaran warga. Oleh sebab itu, diperlukan strategi tambahan seperti sosialisasi yang berkesinambungan, keteladanan dari aparat, peran aktif tokoh masyarakat, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang lebih jelas agar kesadaran kolektif semakin kuat dan partisipasi masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Koya, Kecamatan Tondano Selatan, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Pemerintah Kelurahan Koya telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui berbagai program, seperti pelaksanaan kerja bakti secara berkala, penyediaan kontainer sebagai tempat penampungan sementara, serta

layanan pengangkutan sampah menggunakan armada kebersihan. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan edukasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk memperkuat partisipasi warga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan fasilitas, seperti jumlah TPS, kendaraan operasional, dan perlengkapan kebersihan yang belum memadai. Sosialisasi telah dilakukan melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk, media sosial, dan imbauan langsung, namun penyebaran informasi tersebut belum sepenuhnya efektif dan merata. Pengawasan yang dilakukan pemerintah juga belum berjalan secara konsisten, sehingga tingkat kesadaran masyarakat cenderung berubah-ubah.

b. Kendala Pemerintah dalam Pengelolaan Kebersihan

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah kelurahan meliputi kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, minimnya jumlah petugas kebersihan, serta rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Penumpukan sampah kerap terjadi akibat keterlambatan pengangkutan dan keterbatasan fasilitas penampungan sementara. Dari sisi perilaku masyarakat, masih terdapat perbedaan tingkat kesadaran. Sebagian warga sudah aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, namun sebagian lainnya masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Walaupun koordinasi antara pemerintah dan masyarakat telah terjalin melalui RT/RW, partisipasi warga belum berlangsung secara stabil dan berkesinambungan.

c. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat, pemerintah kelurahan melaksanakan kerja bakti rutin, melakukan sosialisasi, melibatkan sekolah dan kelompok pemuda, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemerintah juga memberikan bentuk apresiasi sederhana kepada lingkungan yang aktif menjaga kebersihan, meskipun belum diberlakukan sanksi tegas bagi pelanggaran kebersihan. Masyarakat pada umumnya memandang kerja bakti sebagai kegiatan yang penting. Namun, tingkat keikutsertaan warga masih bersifat fluktuatif, dengan partisipasi yang cenderung meningkat saat menjelang kegiatan besar atau perayaan tertentu, dan menurun pada hari-hari biasa.

Saran

a. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kelurahan Koya disarankan untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana kebersihan, seperti menambah jumlah TPS, menyediakan kendaraan pengangkut sampah yang lebih memadai, serta melengkapi peralatan untuk kegiatan kerja bakti. Selain peningkatan fasilitas, pengawasan juga perlu dilakukan secara lebih teratur, misalnya dengan membentuk tim pemantau berbasis RT/RW agar pengendalian kebersihan berjalan lebih efektif. Upaya sosialisasi hendaknya diperluas dan dilakukan secara merata melalui berbagai saluran, seperti media sosial, forum warga, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh adat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi sebagai bentuk motivasi sekaligus langkah preventif bagi warga yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, baik dengan terlibat aktif dalam kegiatan kerja bakti maupun dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Partisipasi warga dalam menyampaikan laporan terkait permasalahan kebersihan kepada aparat kelurahan juga sangat diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan

tepat. Semangat gotong royong perlu terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga tanggung jawab menjaga kebersihan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh warga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada peran pemerintah, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kebersihan. Untuk penelitian berikutnya, kajian dapat diperluas dengan menganalisis tingkat efektivitas program kebersihan tertentu, mengukur partisipasi masyarakat dalam jangka panjang, atau melakukan studi perbandingan pengelolaan kebersihan di beberapa kelurahan. Dengan cakupan yang lebih luas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih mendalam dan menjadi referensi yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan kebersihan.

5. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kartasmita, G. (1997). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Slamet, J. S. (2014). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemarwoto, O. (2001). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Soetomo. (2011). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2010). *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- WHO. (2015). *Sanitation and Health Guidelines*. Geneva: World Health Organization